

**REALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
TIONGKOK PADA ASPEK EKSPOR-IMPOR  
SEMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**ANDITA BELVA PUTRA**

20323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**REALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
TIONGKOK PADA ASPEK EKSPOR-IMPOR  
SEMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ANDITA BELVA PUTRA**

20323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**REALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
TIONGKOK PADA ASPEK EKSPOR-IMPOR  
SEMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal  
27 Februari 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina Utami Dewi*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

*Hangga Fathana*  
*Hadza Min Fadhli Robby*  
*Enggar Furi Herdianto*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 27 Februari 2024



ANDITA BELVA PUTRA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR FIGUR</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
<b>BAB 2 Komoditas Ekspor &amp; Impor Tiongkok</b>	<b>16</b>
2.1 Komoditas Ekspor dan Dinamikanya Selama COVID-19	16
2.2 Komoditas Impor dan Dinamika Selama COVID-19	21
2.3 Pembuatan Kebijakan oleh Pemerintah Tiongkok	26
<b>BAB 3 Aplikasi Teori</b>	<b>33</b>
3.1 Politik dalam Negeri	33
3.2 Ekonomi	39
3.3 Konteks Internasional	43
<b>BAB 4 Penutup</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>53</b>

## **DAFTAR TABEL, GAMBAR, GRAFIK, DIAGRAM FIGUR**

Gambar 1. Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri William D Coplin	10
Gambar 2. Ekspor Tiongkok	17
Gambar 3. PDB Tiongkok	40
Tabel 1. Tabel Aplikasi	47

## ABSTRAK

Tiongkok sebagai negara dengan penduduk terbanyak pertama di dunia menjadikannya sebuah negara dengan perekonomian yang cukup kuat. Namun, perekonomian yang kuat tersebut tidak menutup kemungkinan adanya ancaman terhadap Tiongkok. Pada akhir tahun 2019 virus corona ditemukan pertama kali di Tiongkok. Kemudian virus tersebut menyebar secara cepat ke seluruh negara sehingga mendapatkan status sebagai sebuah pandemi COVID-19. Ditemukannya virus corona menyebabkan permintaan masyarakat lokal Tiongkok meningkat drastis terutama pada bahan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kemudian akibat dari pandemi yang menyebar ke seluruh negara Tiongkok mendapatkan predikat sebagai negara penyebar virus. Melihat kondisi yang semakin kacau terutama pada sektor ekonomi Pemerintah Tiongkok bergerak cepat untuk membuat sebuah kebijakan politik perdagangan internasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Decision Making* oleh William D. Coplin yang berfokus pada proses pembuatan kebijakan dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Argumen sementara dalam penelitian ini adalah tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat Tiongkok. Di dalam penelitian ditemukan bahwa ada beberapa tujuan dari dibuatnya kebijakan politik perdagangan internasional Tiongkok dan beberapa faktor yang mempengaruhi.

**Kata-kata kunci:** COVID-19, Tiongkok, Ekspor, Impor, Politik Perdagangan, Decision Making

## ABSTRACT

*China as the world's first most populous country makes it a country with a fairly strong economy. However, this strong economy does not rule out the possibility of threats to China. At the end of 2019 the coronavirus was first discovered in China. Then the virus spread rapidly throughout the country so that it gained status as a COVID-19 pandemic. The discovery of the Corona virus caused the demand of local Chinese people to increase dramatically, especially in staples to fulfill daily life. Then as a result of the pandemic that spread throughout the country, China received the title as a virus-spreading country. Seeing the increasingly chaotic conditions, especially in the economic sector, the Chinese government moved quickly to make an international trade policy. In this study, researchers used the Decision Making theory by William D. Coplin which focuses on the policy-making process and the objectives of the policy. The provisional argument in this study is that the purpose of making the policy is to maintain the welfare of the Chinese people. The research found that there are several objectives of China's international trade policy and several influencing factors.*

**Keywords:** COVID-19, China, Export, Import, Trade Politics, Decision Making

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tiongkok merupakan salah satu negara yang menempati posisi strategis di berbagai bidang. Kontribusi Tiongkok terhadap dunia bisa dikatakan sangat besar. Secara geopolitik letak Tiongkok berada pada Asia Timur dan berbatasan dengan 14 negara. Tiongkok yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dapat mempengaruhi dinamika regional. Pasar yang sangat luas, relasi dagang yang kuat serta kemampuan manufaktur yang mumpuni menjadikan Tiongkok sebagai negara utama dalam perekonomian dunia.

Tiongkok dengan produksi manufaktur global sebesar 28,7% menjadikannya sebagai negara yang berkontribusi terhadap industri di dunia. Pertumbuhan yang pesat dalam sektor manufaktur disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebijakan pemerintah yang baik, besarnya tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Dominasi Tiongkok dalam manufaktur mencakup sektor-sektor seperti tekstil, mesin, dan baja. Tiongkok memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyuplai pasokan global baik dalam bentuk barang mentah maupun barang jadi. Fokus Tiongkok tidak hanya pada menjadi negara pemenuh permintaan lokal namun juga menjadi negara pengekspor utama barang-barang elektronik di dunia. Oleh karena itu, pangsa global Tiongkok yang mencapai 28,7% menunjukkan betapa pentingnya sektor tersebut dalam perekonomian dunia (Fakhriansyah 2023).

Peran utama Tiongkok di perekonomian dunia juga dipengaruhi oleh tingginya angka ekspor dan impor yang dilakukan Tiongkok. Perlu diketahui bahwa kegiatan ekspor dan impor sendiri melibatkan banyak pihak dalam proses

pengiriman barang mulai dari penjual hingga ke pembeli. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor diantaranya adalah eksportir, perusahaan pengapalan, kepabeanan, dan importir di negara yang dituju. Semua pihak tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan ekspor-impor. Dalam menjamin kelancaran ekspor-impor pelaku ekspor dibantu perusahaan pengapalan atau *forwarder* (Hutabarat 1990).

Perusahaan pengapalan merupakan suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan dalam ekspor seperti pengiriman, pengangkutan hingga penerimaan barang. Perusahaan pengapalan cukup membantu dalam distribusi barang baik antar negara maupun di dalam negara. Perusahaan yang hendak melakukan ekspor sangat membutuhkan jasa perusahaan pengapalan untuk menentukan rute kapal yang mudah, murah, dan tersedia di semua negara. Di samping itu, *exportir* juga harus mengetahui secara detail mengenai update dari regulasi ekspor-impor mulai dari hulu sampai hilir demi kelancaran transaksi. Saat ini pengangkutan barang melalui laut mengalami banyak kemajuan terutama dalam sistem pengangkutan barang yang menggunakan kontainer. Kontainer mempermudah proses pemuatan barang karena tidak perlu memindahkan barang satu persatu akan tetapi dapat dipindahkan sekaligus dengan kontainernya. Seiring berkembangnya zaman pengangkutan menggunakan kontainer semakin canggih dan dengan adanya internet pengusaha dapat melakukan riset sebelum melakukan ekspor maupun impor sehingga pengusaha dapat menyesuaikan ukuran kontainer yang akan digunakan. Sedangkan importir memanfaatkan pembelian barang yang cukup besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah jika menggunakan kontainer. Hal tersebut terbukti efektif dalam dunia bisnis dan memberikan keuntungan yang besar (Adhikara 2010).

Akhir tahun 2019 seluruh negara di dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ditemukan pertama kali di Tiongkok dan memberikan dampak di semua sektor, salah satunya di sektor perekonomian. Namun, pada awal kemunculannya Pemerintah Tiongkok berusaha menutupi informasi mengenai penyebaran COVID-19 di negaranya (Huaying 2020). Berbagai kebijakan telah dibuat Pemerintah untuk meminimalisir angka penyebaran COVID-19. Hampir semua negara pada saat terjadi pandemi melakukan *lockdown* atau menutup akses keluar dan masuk ke negara tersebut. Tiongkok sebagai negara tempat ditemukannya virus tersebut melakukan *lockdown* hingga beberapa bulan. Hal tersebut sangat berdampak pada kegiatan ekspor-impor, mengingat sebelum terjadinya pandemi angka ekspor Tiongkok sangat tinggi. Akan tetapi setelah ditemukannya virus *Corona*, Tiongkok mengurangi kuantitas ekspor atau bisa dikatakan angka ekspor Tiongkok menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum adanya COVID-19, dan justru Tiongkok mendorong impor yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelum adanya pandemi COVID-19 (Worldbank 2021).

Keputusan Tiongkok untuk mendorong impor lebih besar dikarenakan penyebaran COVID-19 yang cepat di Tiongkok menyebabkan pabrik-pabrik di Tiongkok berhenti beroperasi, dan untuk menjaga kestabilan perekonomian, maka Tiongkok mulai mendorong impor yang lebih besar. Ternyata kebijakan ini cukup efektif, karena penyebaran COVID-19 di Tiongkok bisa ditekan, dan pabrik-pabrik secara bertahap bisa mulai produksi kembali. Akibat dari perubahan pola ekspor dan impor tersebut, yang mana Tiongkok mulai mendorong impor lebih besar sehingga berdampak terhadap penumpukan kontainer di Tiongkok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya

kontainer yang berhenti di Tiongkok menyebabkan negara- negara eksportir mengalami kelangkaan kontainer yang membuat perusahaan pengapalan saling berebut dan harga kontainer mengalami kenaikan drastis (OEC 2020).

Semenjak Virus COVID-19 menyebar ke seluruh negara, Pemerintah Tiongkok merubah kebijakannya yang pada awalnya berusaha menutupi kasus tersebut, kini menjadi kebalikannya yaitu Pemerintah Tiongkok melalui media banyak memberitakan perkembangan Pandemi COVID-19 di Tiongkok. Peran media menjadi sangat penting untuk menyampaikan kebijakan yang diambil Tiongkok selama pandemi berlangsung. Akan tetapi, Pandemi COVID-19 muncul disaat hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang kurang baik bahkan Presiden Amerika Serikat menyebut bahwa pandemi sebagai “Virus China” yang mana pernyataan tersebut dapat merugikan Tiongkok karena nama negaranya diartikan sebagai bencana (May 2020).

Pandemi COVID-19 yang terus menekan banyak negara untuk bergerak cepat dalam membuat vaksin. Tiongkok merupakan salah satu negara yang bergerak cepat dalam menemukan vaksin COVID-19. Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang berasal dari Tiongkok. Vaksin Sinovac memiliki jenis *inactivated vaccine* yang artinya vaksin ini mengandung virus corona yang telah dilemahkan untuk memancing respons imun sehingga antibodi dapat beradaptasi dan melawan virus corona. Di Indonesia, perusahaan Bio Farma melakukan kerja sama dengan Sinovac untuk memproduksi vaksin, sehingga uji klinis tahap III dilakukan di Indonesia. Perusahaan produsen vaksin Sinovac, Biotech Ltd. mengatakan Vaksin Sinovac memiliki tingkat efektivitas lebih dari 95% setelah diujikan di Indonesia. Sedangkan saat ini, sebanyak 39,1 juta vaksin telah sampai di Indonesia, dengan 3 juta vaksin jadi dan 35 juta vaksin berbentuk bahan baku atau tengah diproduksi

(CNN 2021). Setelah Tiongkok dituding sebagai negara penyebar virus, Pemerintah Tiongkok memprioritaskan ekspor untuk mendistribusikan vaksin ke negara yang mempunyai kerjasama perdagangan dengan Tiongkok terutama seperti negara di Asia Tenggara dan negara di Benua Afrika. Setelah pandemi mulai mereda rute perdagangan internasional yang bisa dikatakan sehat adalah pasar Tiongkok-Amerika Serikat dan Tiongkok-Eropa. Melihat mekanisme pasar tersebut Pemerintah Tiongkok lebih memprioritaskan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa sehingga memicu naiknya harga pengapalan dan harga *freight* di seluruh dunia (Scissors, China's Global Investment Vanishes Under COVID-19 2020).

Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian internasional. Ekspor dan impor dapat meningkatkan pendapatan dan dapat menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Namun, kegiatan ekonomi tersebut tidak selamanya berjalan lancar, ekspor dan impor dapat tersendat sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti krisis kesehatan, konflik antar negara hingga kebijakan sebuah negara. Krisis global seperti pandemi COVID-19 dan hubungan yang kurang harmonis antara Tiongkok dan Amerika Serikat menimbulkan berbagai masalah (Scissors 2016).

COVID-19 yang memaksa sebagian besar negara melakukan *lockdown* untuk meminimalisir penyebaran virus corona membuat angka persediaan dan permintaan kontainer dalam perdagangan internasional tidak seimbang. Sedangkan perang dagang dan kenaikan pajak membuat angka ekspor Tiongkok turun drastis yang mengakibatkan banyak kontainer berhenti di Tiongkok dan menyebabkan kekosongan serta kenaikan harga pengapalan di negara eksportir seperti Indonesia (Agusalim 2017).

*Lockdown* memberikan dampak negatif untuk perdagangan internasional.

Menurunnya permintaan barang yang berasal dari Tiongkok disebabkan oleh pembatasan pertukaran di tingkat global yang lebih kuat atau dengan kata lain permintaan produk Tiongkok dari konsumen menurun sangat drastis selama *lockdown* diberlakukan. Negara yang menerapkan *lockdown* secara ketat akan lebih sedikit mendatangkan barang dari Tiongkok yang mana hal tersebut menggambarkan bahwa ekspor Tiongkok semasa *lockdown* diberlakukan mengalami penurunan walaupun tidak drastis (Hansen, Kamaliev and Schmerer 2023).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Pemerintah Tiongkok semasa pandemi COVID-19 mendorong kebijakan yang meningkatkan impor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan informasi strategi Pemerintah Tiongkok dalam mempertahankan stabilitas ekonomi negara semasa Pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan memberikan informasi tujuan politik luar negeri Pemerintah Tiongkok yang lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal.
3. Untuk mengetahui dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai kondisi Tiongkok ketika angka ekspor negaranya mengalami tantangan akibat dari COVID-19 pada Tahun 2020-2022.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membahas masalah yang terjadi

akibat dari kebijakan politik luar negeri Tiongkok yang lebih memprioritaskan impor dibandingkan ekspor pada saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020-2022. Hal tersebut memberikan dampak yang besar terhadap dunia.

Dampak besar pada perdagangan internasional akibat politik luar negeri Tiongkok tersebut membuat kegiatan ekspor dan Impor tersendat. Penyebab dari dibuatnya kebijakan yang lebih memprioritaskan impor dibanding ekspor oleh Pemerintah Tiongkok adalah pemerintah Tiongkok ingin menjaga pasokan di negaranya tetap stabil selama pandemi COVID-19 masih melanda. Disamping itu adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022 juga menyebabkan ketersendatan dalam perdagangan internasional. Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan teori pembuatan kebijakan yang mana akan menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negeri yang diambil Tiongkok hingga dapat mempengaruhi perdagangan internasional.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah dampak dari politik luar negeri Tiongkok yang mana Tiongkok lebih memperbanyak impor dibandingkan ekspor sehingga dapat mengganggu roda perekonomian dunia khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan tinjauan beberapa penelitian yang membahas tentang kegiatan ekspor dan impor. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan melakukan tiga rujukan yang terdiri dari satu buku dan dua jurnal. Jurnal dan buku yang digunakan untuk tinjauan pustaka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan terutama dalam metode penelitian yang digunakan.

Tinjauan pertama berasal dari buku karya Roselyne Hutabarat. Dalam buku

yang ditulis Hutabarat mengelaborasi mengenai definisi ekspor dan impor, syarat-syarat yang perlu dilakukan untuk melakukan transaksi ekspor-impor dan cara pembayaran dalam ekspor dan impor. Lebih lanjut, Hutabarat menegaskan kegiatan ekspor merupakan sebuah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku atau dengan kata lain ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari Indonesia untuk dimasukkan ke negara lain secara legal. Ekspor merupakan kegiatan paling penting dalam perdagangan ekonomi. Lawan dari ekspor adalah impor, impor sendiri memiliki definisi memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor sama-sama dibutuhkan campur tangan bea cukai baik di negara ekspor maupun negara importir. Hutabarat juga menjelaskan mengenai persiapan yang berkaitan dengan kantor hingga perlengkapan kantor lainnya (Hutabarat 1990).

Sementara itu, pada konteks politik perdagangan Lee dan Chan pada Tahun 2014 menelaah mengenai Tiongkok pada saat ini merupakan negara dengan ekonomi terkuat di dunia sehingga menjadikannya tidak peduli akan *status quo* dari sistem internasional dan rezim-rezim yang berlaku saat ini atau dengan kata lain negara dengan kekuatan baru masuk ke dalam sistem internasional, maka negara tersebut akan berusaha membentuk sistem internasional yang sebelumnya tidak dimiliki dan tidak sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Lebih lanjut, Chan mengidentifikasi Pada saat pandemi SARS Tiongkok mempunyai potensi untuk menjadi negara yang memiliki peran penting dalam peningkatan rezim kesehatan global. Dalam kasus tersebut Tiongkok menjadi aktor yang penghubung antara negara berkembang dengan negara maju dalam hal kebutuhan produk medis dan obat-obatan. Semua yang dilakukan Tiongkok dalam rezim kesehatan global merupakan usaha Tiongkok dalam menarik investasi dan teknologi untuk

meningkatkan kemampuan industri farmasi lokalnya (Chan 2020).

Selanjutnya pada penelitian yang ditulis Setiawan menganalisis mengenai kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia untuk pada era COVID-19. Tepat pada awal tahun 2020, wabah COVID-19 dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia, hal ini mengakibatkan banyak sektor yang terpaksa dihentikan secara mendadak demi mengurangi penyebaran COVID-19 yang saat itu tingkat penyebarannya semakin tinggi setiap harinya. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap beberapa sektor yang ada di dalam pemerintahan terutama pada sektor keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Pandemi COVID-19 membuat berbagai sektor mengalami kerugian, oleh sebab itu pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi di berbagai sektor tersebut agar dapat keluar dari situasi krisis yang tengah dihadapi Indonesia (Setiawan 2020).

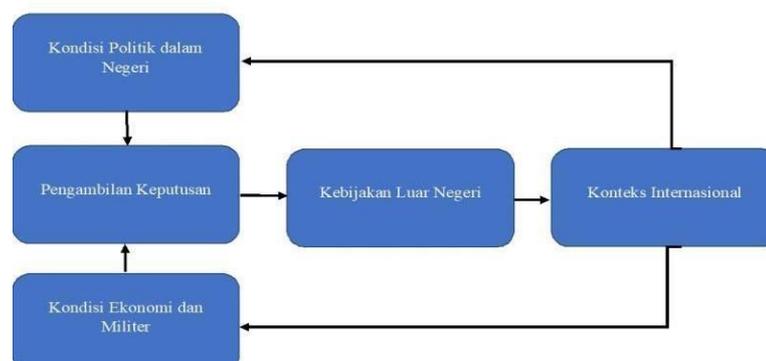
Kebijakan yang paling pertama dilakukan pemerintahan Indonesia yang dikeluarkan pada akhir bulan Januari 2020 adalah dengan menyiagakan 100 rumah sakit siaga dan tenaga medis spesialis dalam bagi para pasien yang terpapar virus corona. Kebijakan berikutnya adalah memerintahkan kedutaan besar Indonesia di China untuk lebih memperhatikan penduduk Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Wuhan dan terisolasi disana, selain itu juga pemerintah Indonesia juga memerintahkan pemasangan alat pengecek suhu pada beberapa tempat transportasi sebanyak 135 buah baik bandara dan juga pelabuhan yang sudah disesuaikan standarnya dengan aturan milik WHO selaku lembaga kesehatan dunia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengecek sedini mungkin gejala yang mungkin masuk melalui jalur-jalur masuk Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Anung Sugihantono selaku perwakilan kemenkes, upaya khusus

untuk mengatasi corona sampai saat ini belum ditemukan, dan untuk mengatasinya dapat disesuaikan dengan gejala dari pasien COVID-19 (Setiawan 2020).

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penulisan penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori pengambilan keputusan. Teori ini dapat menjelaskan alasan sebuah negara mengambil kebijakan luar negerinya. Teori pengambilan keputusan politik luar negeri ini digagas oleh William D. Coplin. Kebijakan politik luar negeri yang bersifat umum dapat dilakukan melalui pernyataan kebijakan dan tindakan langsung Coplin menyatakan bahwa politik luar negeri dapat menjelaskan mengenai aktivitas yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Aktivitas tersebut diantaranya adalah kebijakan umum, kebijakan administratif, dan kebijakan kritis. Kebijakan umum dalam politik luar negeri dapat dilakukan melalui perantara pernyataan kebijakan dan tindakan langsung. Kebijakan yang bersifat administratif dibuat oleh pejabat yang lebih rendah jabatannya. Sedangkan, kebijakan politik luar negeri yang bersifat kritis membahas mengenai kondisi darurat yang akan membawa dampak jangka panjang dan dapat mengancam makhluk hidup (Coplin 2003). Jika dilihat dari pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan Pemerintah Tiongkok dalam memprioritaskan kebutuhan pokok masyarakat lokalnya merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang bersifat krisis.

**Gambar 1. Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri William D Coplin**



Teori pengambilan keputusan yang ditulis Coplin juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di sebuah negara. Faktor tersebut adalah kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi suatu negara, dan kekuatan militer di tingkat internasional. Ketiga faktor tersebut selanjutnya akan mempengaruhi alasan politik luar negeri di suatu negara diterapkan. Disamping itu, Coplin mengelompokkan negara menjadi dua kelompok yaitu kelompok negara maju dan kelompok negara terbelakang. Negara maju cenderung mempunyai PDB yang tinggi dengan kapasitas produksi yang bervariasi, sedangkan negara terbelakang cenderung memiliki PDB yang lebih rendah dan memiliki ketergantungan ekonomi pada negara lain. Perbedaan antara negara maju dan negara terbelakang inilah yang menjadikan kebijakan luar negeri setiap negara berbeda-beda. Coplin juga menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat di sebuah negara tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun kebijakan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan terhadap tiga faktor yang telah disebutkan. Dalam kasus yang akan menjadi penelitian ini, kondisi ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengambil keputusan. Pengambil keputusan menjadi aktor terpenting yang bertanggung jawab untuk menciptakan kestabilan ekonomi di dalam negaranya dengan memahami keterbatasan yang dimiliki negara (Coplin 2003).

Analisis Coplin berfokus pada hubungan antar aktor pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor dalam negeri yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Di sebagian negara para pemimpin negara seperti Presiden, Perdana Menteri hingga Raja menjadi aktor yang dominan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Ketika menganalisis kekuatan ekonomi

Tiongkok, dapat diketahui jika Tiongkok merupakan negara maju. Untuk mengambil sebuah keputusan selama terjadinya Pandemi COVID-19, Tiongkok tidak perlu takut dengan konsekuensi jangka panjang yang akan terjadi. Walaupun kebijakan yang diambil Pemerintah Tiongkok dapat menyebabkan tersendatnya perdagangan internasional namun Tiongkok tetap yakin keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat untuk mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi negaranya (Coplin 2003). Dari teori yang digunakan dapat variabel bebas terletak pada pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi segalanya. Sedangkan variabel terikatnya adalah kebijakan luar negeri yang diambil Pemerintah Tiongkok pada saat pandemi berlangsung.

### **1.7 Argumen Sementara**

Realisasi perdagangan internasional Tiongkok semasa pandemi COVID-19 mendorong terjadinya impor yang lebih besar dibanding ekspor karena teori *decision making* yang digagas oleh William D. Coplin memiliki beberapa pertimbangan untuk pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Pertimbangan tersebut adalah politik dalam negeri, ekonomi, dan konteks internasional. Ketiga pertimbangan tersebut sangat berperan penting dalam pembuatan kebijakan di sebuah negara (Coplin 1965). Pertimbangan Tiongkok dalam realisasi perdagangan semasa pandemi COVID-19 yang mendorong impor besar-besaran dan menjaga ekspor agar tidak berlebihan adalah pada tahun 2020-2022 angka impor negara Tiongkok sangat besar dikarenakan kebutuhan masyarakat lokal Tiongkok yang sangat besar sehingga Pemerintah Tiongkok harus mengimpor semua barang yang dibutuhkan masyarakatnya. Impor yang dilakukan Tiongkok kebanyakan

merupakan hasil alam seperti bahan pangan, besi, dan baja. Hal tersebut terjadi mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara dengan angka manufaktur yang cukup produktif dan jumlah warga negara Tiongkok yang cukup tinggi. Kemudian pada saat pandemi berlangsung Tiongkok berusaha menjaga angka ekspornya agar tidak berlebihan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakatnya yang terus melonjak dan menjaga cadangan komoditas. Ekspor yang dilakukan Tiongkok selama pandemi kebanyakan adalah alat kesehatan, vaksin, barang elektronik hingga bantuan tenaga kesehatan yang manapada saat itu banyak negara yang membutuhkan. Selain untuk membantu negara lain ekspor yang dilakukan Tiongkok juga bertujuan untuk mengembalikan citranya di dunia karena sebelumnya dianggap sebagai negara yang gagal dalam menangani pandemi dan sebagai negara penyebar virus (Burhan 2021).

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti menganggap metode ini merupakan salah satu metode yang tepat untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam metode kualitatif ini penulis tidak akan menggunakan banyak prosedur angka dalam mengumpulkan data. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang mendalam dengan mengutamakan pemahaman terhadap suatu masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian (Sugiarto 2015).

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian yang berjudul Politik Perdagangan Internasional Tiongkok Semasa Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2022 yaitu Politik Negara

Tiongkok dimana Tiongkok merupakan aktor utama di dalam isu tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Tiongkok yang mana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perdagangan internasional.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu dengan cara observasi, studi pustaka, dan analisis. Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah hasil dari informasi yang dilakukan melalui data-data yang sebelumnya pernah dibuat yang mana data didapatkan dan dikumpulkan melalui buku, jurnal, dan artikel.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pertama penulis akan mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah, kemudian penulis akan menganalisis menggunakan data yang sudah diperoleh dan menggunakan teori yang telah disebutkan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Bab I dalam penelitian ini penulis akan menulis pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan. Bab II dalam penelitian ini berisi tentang pembahasan yang akan menjelaskan pemaparan masalah berdasarkan variabel yang ada di kerangka pemikiran yang mana dalam penelitian ini penulis akan memaparkan kronologi dibuatnya kebijakan luar negeri Tiongkok pada saat pandemi. Pada bab III penulis akan menguraikan bagaimana rumusan masalah dijawab melalui aplikasi kerangka pemikiran dan menggunakan data yang diperoleh yaitu menguraikan Bagaimana dampak dari Politik Perdagangan

Internasional Tiongkok Semasa Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020-2022 dengan menggunakan teori *Policy Making* dari Coplin. Dalam bab IV penulis akan menyimpulkan semua hasil temuan yang ditemukan dalam penelitian.

## **BAB 2**

### **Komoditas Perdagangan Tiongkok Semasa Pandemi COVID-19**

#### **2.1 Komoditas Ekspor dan Dinamikanya Selama COVID-19**

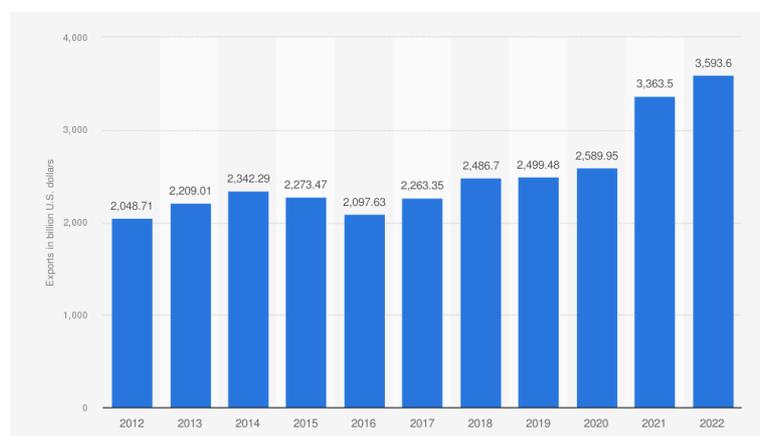
Pada bulan Desember 2019, hampir seluruh dunia digegerkan dengan adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona di Kota Wuhan, China. Pada awal tahun 2020, wabah tersebut secara cepat menyebar ke seluruh negara di dunia. Akibat dari adanya pandemi tersebut mengakibatkan banyak sektor yang terganggu bahkan terhenti. Sektor yang terdampak diantaranya adalah sektor ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan sektor pendidikan. Dihentikannya beberapa sektor tersebut bertujuan untuk mencegah dan memutus penyebaran virus COVID-19. Semua negara bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut dengan membuat beberapa kebijakan. Selain untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 kebijakan tersebut berguna untuk memulihkan dan membangun kondisi di berbagai sektor yang telah terhenti agar dapat menemukan solusi untuk keluar dari situasi yang kritis di tengah pandemi (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila 2021).

Hingga saat ini virus COVID-19 masih melanda dunia. Banyak sekali populasi dunia yang dilanda dengan virus corona, ratusan bahkan hingga jutaan manusia menjadi korban dari keganasan virus yang berasal dari Wuhan, China. Dimulai dari akhir tahun 2019 hingga saat ini, permasalahan *corona virus* atau COVID-19 masih menjadi salah satu perhatian dunia, setiap waktunya COVID-19 selalu melangkah lebih jauh lagi melalui perkembangan varian dan mutasi yang terjadi di berbagai situasi. Virus ini juga merupakan salah satu penyakit menular yang sangat cepat dan mematikan penularannya, virus corona ini dalam penularannya dapat terjadi melalui kontak fisik seperti ditularkan melalui mulut,

mata, dan hidung. Karena berbagai situasi tersebut, membuat negara dalam pandangan bagaimana dampak wabah COVID-19 terhadap penanganan pelayanan publik dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk penanggulangan wabah COVID-19 ini (Levani, Prasty and Mawaddatunnadila 2021).

Dalam situasi seperti ini, negara akan dipantau secara langsung bagaimana langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pandemi. Negara akan berada dalam situasi menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan dan kebijakan yang terbaik bagi masyarakatnya, langkahnya baik atau tidak, menjadi langkah kebijakan yang terlihat stabil atau malah menjadi krisis kebijakan di situasi penting seperti ini. Kemudian, kebijakan yang diambil nanti akan memberikan dampak apa saja, baik atau buruk nanti hasilnya bagi masyarakat. Dalam langkah terakhirnya, kebijakan yang diambil nanti juga perlu dilihat bagaimana tata cara pengelolaan sumber daya publiknya, khususnya dalam hal anggaran, karena dalam situasi seperti COVID-19 ini relatif tinggi potensi penyimpangannya (Nathanael 2021).

Gambar 2. Ekspor Tiongkok



Sumber: Statista.com (2023)

Selama pandemi COVID-19, ekspor Tiongkok mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada awal pandemi, ekspor Tiongkok mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan banyak negara yang khawatir penyebaran COVID-19 jika melakukan impor dari Tiongkok, dan akibatnya banyak pabrik-pabrik yang berhenti beroperasi seiring dengan menyebarnya COVID-19 yang cukup cepat di Tiongkok. Kemudian perubahan kebijakan Tiongkok untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan menutup sementara produksi di pabrik-pabrik dan mendorong impor ternyata cukup efektif. Seiring berjalannya waktu Tiongkok beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan global yang terus berkembang dengan memanfaatkan manufaktur dan infrastrukturnya. Pada awal COVID-19 seluruh negara melakukan *lockdown* sehingga menghambat produksi dan transportasi di Tiongkok. Banyaknya pabrik yang ditutup menyebabkan penurunan pada aktivitas ekspor (Worldbank 2021).

Akan tetapi, Tiongkok dengan cepat menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan berbagai langkah untuk membangkitkan ekspornya. Pemerintah Tiongkok memperkenalkan kebijakan yang mendukung seperti insentif pajak, subsidi, dan menyederhanakan bea cukai untuk meringankan beban di dunia perekonomian dan merangsang perdagangan. Pandemi COVID-19 juga mendorong ulang prioritas ekspor Tiongkok. Di tengah kebiasaan dan tren baru masyarakat di tengah pandemi seperti kerja dari jarak jauh dan digitalisasi, Tiongkok beralih pada ekspor bernilai tinggi. Pergerakan ekspor Tiongkok tersebut memerlukan penekanan yang lebih besar pada produk-produk teknologi seperti *smartphone*, laptop, dan peralatan medis yang relevan dengan digitalisasi pasca pandemi (BBC 2020).

Pada April 2021 Tiongkok berhasil menjadi negara pertama yang angka

infeksius COVID-19 paling rendah. Melihat hal tersebut pemerintah mencabut *lockdown* yang telah dilakukan selama sebelas minggu. Setelah pencabutan *lockdown* selanjutnya Pemerintah Tiongkok melakukan vaksinasi massal terhadap masyarakatnya, program tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya lonjakan pasien. Vaksin yang digunakan merupakan hasil dari kerja sama Pemerintah Tiongkok melalui COVAX yang mana hal tersebut merupakan tanggungjawab Tiongkok untuk menyediakan vaksin baik dalam negeri maupun vaksin untuk global (Hotez 2014).

Setelah berhasil memberikan vaksin kepada masyarakat lokalnya, selanjutnya Tiongkok mendesak semua negara untuk menjadikan vaksin sebagai barang global. Tiongkok juga memastikan persebaran vaksin dunia merata dan menghimbau semua negara untuk segera mempercepat vaksinasi untuk mengurangi kesenjangan vaksinasi antar negara. Tiongkok juga menawarkan aksesibilitas, ketersediaan dan keterjangkauan vaksin di seluruh negara melalui kerja sama internasional baik secara bilateral maupun multilateral.

Persebaran vaksin tidak hanya melalui penjualan dan donasi yang diberikan. kerja sama transfer teknologi juga dilakukan Tiongkok dalam distribusi vaksinnya. kerja sama transfer teknologi yang digunakan Tiongkok adalah dengan cara mendirikan pabrik untuk pengembangan vaksin di berbagai wilayah seperti Afrika, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara yang salah satunya ada di Indonesia dan malaysia. Dengan menggunakan strategi tersebut Tiongkok berasumsi bahwa vaksinasi dunia akan cepat terlaksana dan merata (Verma 2020).

Pada saat pandemi berlangsung Tiongkok juga berwawasan ke luar artinya adalah Tiongkok mementingkan kesejahteraan bersama dengan cara memaksimalkan kerja sama. Tindakan tersebut dapat dilihat dari Tiongkok yang

tidak menimbun alat kesehatan seperti negara lain. Di samping itu Pemerintah Tiongkok juga mendonasikan alat kesehatannya ke negara yang dianggap membutuhkan.

Tiongkok memanfaatkan momentum COVID-19 untuk membangun sebuah narasi bahwa Tiongkok mampu menghadapi pandemi. Tiongkok menggunakan perkembangan teknologi, kesehatan dan kemampuan ilmiah untuk menciptakan narasi tersebut. Untuk memperkuat citranya sebagai negara yang mampu menghadapi pandemi yang menyebabkan krisis global Tiongkok mendistribusikan bantuan lebih dari 120 negara. Sumbangan tersebut berupa alat kesehatan seperti masker, obat-obatan, ventilator, termometer dan suplai layanan medis lainnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat gangguan pada awal kemunculan COVID-19, ekspor Tiongkok selama pandemi menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi, sehingga berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dan dinamika perdagangan global (Zhou 2021).

Ekspor Tiongkok semasa pandemi COVID-19 tidak hanya disektor kesehatan saja namun sektor teknologi juga menjadi fokus dalam ekspor Tiongkok selama pandemi berlangsung. Masyarakat yang beralih bekerja dan aktivitas dari rumah menyebabkan angka permintaan alat elektronik meingkat signifikan. Perusahaan besar Tiongkok seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba juga memanfaatkan peluang dalam mempertahankan ekspor Tiongkok semasa pandemi. Produk unggulan yang diekspor ke dunia oleh Tiongkok adalah peralatan transmisi untuk *radioteleph incorpo*, suku cadang dan aksesoris, serta peralatan listrik. Barang-barang tersebut merupakan komoditas ekspor yang bernilai tinggi dan cukup potensial (World Bank 2021).

Data yang diperoleh dari OEC menunjukkan angka eskpor total Tiongkok

pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar \$2.65T. Sedangkan pada tahun 2021 angka ekspor Tiongkok mengalami kenaikan sebesar \$3.34T. Data yang didapatkan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan global sangat bergantung pada Tiongkok sehingga memaksa negara tersebut untuk terus melakukan ekspor walau pandemi sedang melanda (OEC 2021).

Walaupun banyak negara yang mengalami resesi pada saat pandemi di tengah tahun 2021, pendapatan retail Tiongkok malah justru naik cukup pesat. Rumah tangga di pedesaan dan perkotaan juga terus mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup stabil. Banyak pembeli barang retail dari Tiongkok menyatakan bahwa konsumen lebih memilih barang dari Tiongkok karena produk yang dihasilkan oleh Tiongkok menawarkan *value for money* yang lebih memuaskan (Statista 2023).

Meskipun demikian tidak semua sektor di Tiongkok mengalami kenaikan dalam ekspor, COVID-19 yang melanda Tiongkok tidak selamanya menjadi sebuah potensi untuk Tiongkok, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2022 ketika kebijakan *lockdown* diterapkan kembali pendapatan penjualan dari retail penjualan barang di Tiongkok mengalami penurunan (Statista 2023). Pada sektor pariwisata dan otomotif, yang mana pada saat pandemi sektor tersebut mengalami penurunan daya beli konsumen. Hal tersebut memaksa Tiongkok untuk terus berupaya untuk mencari cara agar ekspornya tetap berjalan dan mencari peluang baru di tengah tantangan yang dihadapinya (Arbar 2021).

## **2.2 Komoditas Impor dan Dinamika Selama COVID-19**

Awal Tahun 2020 Pandemi COVID-19 ditemukan di Tiongkok dan menyebabkan kebutuhan masyarakat lokal Tiongkok pada saat itu melonjak drastis.

Permintaan tersebut meliputi kebutuhan bahan pangan dan alat kesehatan. Pandemi tersebut menyebar dan menular secara cepat sehingga banyak negara yang sudah terinfeksi. Pandemi COVID-19 sangat mengganggu kehidupan di dunia salah satunya adalah di sektor ekonomi. Selain ekonomi sektor pariwisata juga berhenti total akibat adanya pandemi. Akibat dari pandemi yang semakin merajalela pertumbuhan ekonomi di dunia mengalami perlambatan atau penurunan hal tersebut terjadi karena angka ekspor dan impor yang menurun drastis (Duckett 2021).

Mewabahnya pandemi berdampak pada dinamika perdagangan global dan mengganggu rantai pasokan. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan menjadi pusat perdagangan internasional, Tiongkok menghadapi sebuah tantangan. Pandemi mengganggu semua aktivitas di Tiongkok dan menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat, dengan memprioritaskan impor, Tiongkok dapat memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan seperti bahan pangan, energi dan bahan baku untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan produksi.

Tiongkok sebagai negara ditemukannya pandemi pertama kali memiliki beban yang sangat besar yaitu permintaan masyarakat lokalnya yang cukup tinggi pada saat pandemi. Ketahanan pasokan membuat Tiongkok mengimpor barang-barang penting yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan dan memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi di tengah krisis. Dengan impor pula Tiongkok bisa mengurangi ketergantungan pada produksi domestik yang lebih rentan terhadap gangguan.

Selain itu dengan membuka diri terhadap impor, Tiongkok secara tidak langsung juga ikut dalam pemulihan ekonomi global. Mengimpor barang dari

negara lain dapat memperkuat perdagangan internasional dan memulihkan pertumbuhan ekonomi di tengah gempuran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dengan memprioritaskan impor selama pandemi berlangsung merupakan strategi Tiongkok yang cukup penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan pasokan, serta Tiongkok juga berkontribusi terhadap upaya pemulihan ekonomi global (Cook and Matschke 2023).

Komoditas pertanian di Tiongkok memiliki luas 5,3 juta KM. besarnya sumber daya pertanian dan menjadi salah satu negara agraris membuat Pemerintah Tiongkok memberikan perhatian yang cukup tinggi pada sektor tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengutamakan masyarakatnya untuk bekerja di bidang pertanian. Fokus tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan, peningkatan pendapatan terutama para petani, dan penguatan daya saing pertanian di kancah internasional. Pemerintah Tiongkok melibatkan sektor non pertanian untuk mendukung lembaga dan sistem kebijakan yang baik untuk mengembangkan sektor pertaniannya. Kebijakan tersebut dapat dilihat seperti pembelian barang minimum, target harga dan subsidi pangan dan penghapusan pajak pertanian (OECD 2018).

Kebijakan dalam sektor pertanian tersebut berhasil menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara dengan produksi seperempat biji-bijian dunia dan mendapatkan peringkat pertama dalam produksi sereal, kapas, buah, sayur dan produk perikanan. Keberhasilan Tiongkok dalam sektor pertanian membuka lebar peluang bagi negara lain untuk menjalin kerja sama di bidang pertanian. Tiongkok sendiri adalah salah satu negara yang terbuka untuk menjalin kerja sama dengan negara lain di bidang pertanian dan merupakan salah satu negara yang aktif dalam memberikan subsidi bahan pangan kepada negara-negara berkembang.

Selain memiliki sumber daya dan luas pertanian yang cukup besar, Tiongkok juga berhasil mengembangkan inovasi teknologi yang turut mendukung keberhasilan dalam sektor pertanian. Dengan subsidi yang diberikan Pemerintah Tiongkok para petani bisa menggunakan teknologi tinggi dalam mengelola pertanian. Salah satu bukti kemajuan inovasi dalam pertanian Tiongkok adalah petani dapat menggunakan drone untuk menyemprotkan pestisida. Pada tahun 2020 Pemerintah Tiongkok melakukan eksperimen menggunakan AI untuk mengelola pertaniannya (Juul 2021).

Salah satu contoh kerja sama yang dilakukan Tiongkok di sektor pertanian adalah kerja sama dengan anggota ASEAN yang terikat dengan perjanjian ACFTA. Dengan terjalinnya hubungan yang baik kerja sama tersebut mendapatkan penghapusan tarif dan hambatan lainnya sehingga hal tersebut mempermudah negara-negara dalam menjalin kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. kerja sama yang dijalin tersebut sangat bermanfaat bagi kedua negara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan selama ini seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan efisiensi biaya dan meminimalisir ancaman yang dapat mengancam keamanan bersama dengan kerja sama yang sifatnya kooperatif.

Fenomena pandemi COVID-19 membuka lebar peluang untuk negara-negara agraris lain untuk mengeksport hasil pertaniannya ke Tiongkok mengingat pada saat itu masyarakat lokal Tiongkok sangat membutuhkan bahan pangan seperti beras. Momentum perubahan pola dagang internasional memberikan ruang kepada negara lain untuk melakukan perbaikan neraca perdagangannya (Timorria 2021).

Sebagai contoh adalah pada saat terjadinya pandemi, Tiongkok melakukan impor bahan pangan dari negara agraris lainnya seperti Indonesia. Tiongkok merupakan mitra dagang paling besar bukan hanya untuk satu negara melainkan

untuk negara ASEAN secara menyeluruh karena memberikan keuntungan yang cukup besar di kawasan tersebut terutama di sektor ekonomi. Menurut statistik Tiongkok meskipun terjadi pandemi, volume perdagangan antara negara lain dengan Tiongkok meningkat sebesar 2,2% (World Bank 2020).

Data yang didapat dari OEC menunjukkan data bahwa total impor Tiongkok pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar \$1.55T. Sedangkan pada tahun 2021 didapatkan data impor Tiongkok sebesar \$1.97T, sehingga dari data yang didapatkan bisa ditarik kesimpulan bahwa impor Tiongkok pada saat pandemi mengalami kenaikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kestabilan dalam negerinya karena mengingat banyak pabrik-pabrik yang tutup pada saat pandemi (OEC 2021).

Selain permintaan masyarakat yang besar pada saat pandemi berlangsung, pendapatan perkapita yang naik sebelum adanya pandemi menyebabkan permintaan komoditas pertanian Tiongkok naik drastis. Peningkatan tersebut akan menyebabkan meningkatkan daya beli konsumen, sehingga komoditas yang dikonsumsi juga akan lebih banyak terutama komoditas pertanian. Peningkatan pendapatan perkapita mendorong perkembangan industri di Tiongkok, termasuk industri berbahan baku komoditas pertanian. Perkembangan industri otomotif yang meningkat semenjak pandemi di Tiongkok juga menyebabkan Tiongkok mengimpor komoditas karet secara besar. Oleh karena itu perkembangan industri dan permintaan masyarakat Tiongkok yang cukup banyak ketika pandemi menyebabkan ekspor di bidang pertanian naik secara drastis.

Kacaunya situasi ketika terjadinya pandemi membuat perubahan yang sangat besar di seluruh negara. Negara besar seperti Tiongkok juga mengalami kesulitan disaat pandemi melanda. Permintaan masyarakat yang sangat tinggi serta

ketersediaan stok persediaan bahan baku yang terus berkurang memaksa Tiongkok melakukan impor secara besar-besaran. Permintaan masyarakat paling besar adalah pada komoditas bahan pangan seperti beras, gandum dan lainnya. Walaupun Tiongkok sedang mengalami pandemi namun Pemerintah tetap memikirkan persiapan pasca pandemi untuk memperbaiki perekonomiannya. Sehingga pemerintah mempersiapkan pada sektor industri untuk memperbaiki perekonomian. Akibatnya adalah Pemerintah mau tidak mau harus mengimpor barang dari negara lain (Worldbank 2021).

### **2.3 Pembuatan Kebijakan oleh Pemerintah Tiongkok**

Adanya pandemi COVID-19 di dunia sebenarnya membawa dampak positif maupun negatif pada kegiatan masyarakat dunia. Pandemi yang membatasi pergerakan manusia membuat banyak pihak berlomba-lomba untuk berinovasi di tengah pandemi. Salah satu hasil positif dari pandemi yang hingga saat ini masih dilakukan adalah gaya hidup masyarakat yang berubah dimana sebelum adanya pandemi masyarakat cenderung abai akan kebersihan, kesehatan, dan pola makan, kini akibat ada inovasi mereka lebih peduli dengan kebersihan dan kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Sedangkan dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 adalah terhambatnya perdagangan internasional. Terhambatnya perdagangan internasional sendiri terjadi karena angka ekspor dan impor yang tidak seimbang. Awal mula dari ketidakseimbangan tersebut adalah dari Tiongkok yang mana membuat sebuah kebijakan politik perdagangan internasional pada saat pandemi berlangsung.

Ekspor sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mana menjual barang maupun jasa yang diproduksi ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan sebuah

kegiatan yang mana bertujuan membeli atau mendatangkan barang yang diproduksi negara lain. Baik ekspor maupun impor adalah kegiatan yang dapat membentuk perdagangan internasional. salah satu fungsi inti dari politik luar negeri adalah untuk mendorong perdagangan internasional. Ekspor dan impor dapat menambah devisa negara yang melakukannya sehingga peran pemerintah sangat penting dalam menjaga kegiatan ekspor dan impor. Alasan negara untuk melakukan kegiatan ekspor adalah untuk menambah devisa negara tersebut sedangkan negara melakukan impor karena negara tersebut belum atau tidak memproduksi suatu barang sehingga untuk memenuhi kebutuhannya negara tersebut melakukan impor.

Selama pandemi melanda Tiongkok menerapkan kebijakan perdagangan yang berfokus pada beberapa aspek. Kebijakan pertama adalah pengendalian ekspor dan impor terutama pada barang medis yang mana ketika COVID-19 ditemukan pertama kali, Tiongkok mengalami lonjakan permintaan barang medis, untuk memastikan ketersediaan Tiongkok melakukan pembatasan ekspor terhadap barang medis dan mengimpor barang medis dari negara lain. Walaupun terjadi gangguan dalam rantai pasokan, Tiongkok tetap memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk menjaga perdagangan dengan mitra dagangnya. Bersamaan dengan memenuhi kebutuhan dalam negaranya Tiongkok juga mengimplementasikan kebijakan stimulus ekonomi untuk mendukung sektor yang terdampak oleh pandemi seperti perdagangan dan manufaktur. Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kemudian Tiongkok berusaha untuk mempromosikan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi, Tiongkok mendukung inisiatif multilateral *Regional Comprehensive Economic Partnership* dan memperkuat hubungan perdagangan dengan mitra dagangnya (Wu 2022).

Selama COVID-19 proses pembuatan kebijakan yang dilakukan

Pemerintah Tiongkok melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme yang melibatkan pemerintah, masyarakat serta lembaga-lembaga terkait. Dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Tiongkok pertama kali melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai perkembangan COVID-19 baik secara nasional maupun dunia. Data mengenai pandemi yang telah didapatkan selanjutnya dipantau dengan cermat untuk mendukung proses pengambilan suatu keputusan.

Setelah melakukan pemantauan dan analisis data, Pemerintah Tiongkok melakukan menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional untuk mencegah penyebaran di dalam negaranya. Kebijakan tersebut adalah dengan melakukan *lockdown*, pemberlakuan *work from home* hingga pemberian stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan baik di tingkat nasional, provinsi bahkan hingga kabupaten. Dalam pelaksanaannya pihak berwajib bertanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokalnya dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan arahan pemerintah pusat (Swaine 2020).

Kebijakan *lockdown* yang telah dibuat Pemerintah Tiongkok mengakibatkan aktivitas masyarakat lokal Tiongkok maupun masyarakat internasional menjadi menurun drastis. Produksi dan investasi juga ikut menurun dan berdampak pada menurunnya perekonomian Tiongkok. Peran Tiongkok yang sangat kuat dalam perdagangan internasional menyebabkan negara yang sebelum adanya pandemi bergantung pada Tiongkok seperti Jepang mengalami kelangkaan beberapa komoditas di negaranya. Kekacauan yang diakibatkan COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Tiongkok menciptakan ketidakpastian pada pasar keuangan global. Dalam menangani krisis tersebut Tiongkok bekerja sama dengan bank sentral Tiongkok untuk berupaya menurunkan suku bunga kebijakan dan

melakukan berbagai stimulus untuk menjaga stabilitas keuangan di Tiongkok. Stimulus yang diberikan Pemerintah Tiongkok terutama di sektor pariwisata mengingat pariwisata Tiongkok berhenti total akibat COVID-19. Kebijakan pengurangan jumlah penerbangan akibat *lockdown* yang sebelumnya dibuat oleh Tiongkok menjadikan perekonomian semakin melemah (Setiawan 2020).

Walaupun Tiongkok memiliki sistem politik yang terpusat, Pemerintah Tiongkok juga melibatkan konsultasi dan masukan umpan balik dari masyarakatnya dan para ahli dalam proses pembuatan kebijakannya. Hal tersebut dilakukan melalui pertemuan publik. Dalam proses pembuatan kebijakan Pemerintah Tiongkok juga melibatkan koordinasi antara berbagai departemen dan Lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Urusan Luar Negeri, Badan Pembangunan dan Reformasi Nasional. Kerja sama antar sektor pemerintahan cukup penting dalam aspek pembuatan kebijakan.

Selama pandemi masih melanda, kebijakan-kebijakan dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi keefektifitasnya dan menyesuaikan strategi yang diperlukan kedepannya. Dari data dan pengalaman yang didapat dari penerapan kebijakan, penyesuaian dilakukan untuk memastikan respons yang tepat terhadap perkembangan situasi. Proses pembuatan dan penerapan kebijakan Tiongkok semasa pandemi menggambarkan keselarasan antara keterlibatan pemerintah pusat, pelaksanaan di tingkat lokal dan upaya koordinasi yang baik antar sektor dalam menangani tantangan yang dihadapi Tiongkok (Ogijiuba 2021).

Dari situasi yang disebabkan oleh pandemi, membuat kondisi di setiap negara di dunia berbeda-beda, karena pergerakan virus COVID-19 ini sangat cepat dan mudah untuk menyebar dengan cepat menyebarnya virus tersebut juga membuat kondisi di beberapa negara sangat tidak terkendali. Dalam beberapa

kasus, banyak negara melakukan kesalahan dalam lambatnya mengambil kebijakan dan koordinasi dalam hal penanggulangan virus COVID-19 ini masuk ke negaranya (Verma 2020).

Di samping itu, Pemerintah Tiongkok juga membuat kebijakan untuk mengimpor barang yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut dibuat oleh Presiden Tiongkok pada masa Pandemi COVID-19 memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang melonjak tinggi mengingat Tiongkok adalah negara pertama ditemukannya COVID-19 sehingga kondisi tersebut memaksa Pemerintah Tiongkok untuk memastikan kebutuhan masyarakatnya terjamin selama pandemi berlangsung. Walaupun keputusan Presiden Tiongkok bertujuan baik untuk mensejahterakan masyarakatnya semasa Pandemi COVID-19 namun keputusan tersebut dapat mengganggu perdagangan internasional.

Jumlah ekspor dan impor yang seimbang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi internasional. Apabila jumlah ekspor dan impor tidak seimbang maka akan mengganggu perekonomian dunia. Jumlah ekspor dunia yang terlalu banyak akan mendorong negara lain untuk lebih banyak memproduksi suatu komoditas yang dibutuhkan. Sedangkan apabila impor dilakukan secara besar-besaran maka akan membuat suatu negara mengalami penurunan produktivitas dalam negeri dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dalam konteks kasus yang diangkat dampak dari ekspor Tiongkok yang tidak seimbang dengan impor selama pandemi COVID-19 menyebabkan perdagangan internasional terganggu yang kemudian menghambat pertumbuhan perekonomian dunia.

Ekspor dalam jangka pendek akan berpengaruh positif dan cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif dari ekspor adalah

untuk menggerakkan roda perekonomian baik dalam negeri maupun di kancan internasional. Akan tetapi, jika impor terus dilakukan sebuah negara maka akan berpengaruh negatif untuk sebuah negara. Tiongkok melakukan impor secara besar besaran pada saat COVID-19 adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dampak positif dari impor dengan skala besar yang dilakukan Tiongkok adalah bisa membuka kesempatan kepada negara lain untuk memproduksi komoditas unggulannya dan dapat menambah devisa negara yang mengekspor komoditasnya ke Tiongkok. Namun dampak negatif dari ekspor yang terlalu sedikit adalah banyak kontainer yang berhenti di Tiongkok yang mengakibatkan negara lain kekurangan kontainer tersebut.

Melambatnya perdagangan internasional tidak hanya disebabkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Tiongkok yang ingin menjamin kesejahteraan masyarakat lokalnya. Namun, ketika Tiongkok dan semua negara melakukan *lockdown* pengiriman barang di seluruh dunia mengalami banyak gangguan seperti waktu yang lebih lama dan diterapkannya protokol kesehatan dapat menambah biaya pengiriman barang. Selain itu larangan untuk mengekspor dan mengimpor beberapa komoditas juga dapat mengganggu rantai pasokan logistik dunia

Seluruh negara di dunia mengalami krisis yang sama, perbedaan kawasan dan status negara akan menciptakan masalah perekonomian baru. Kawasan yang paling merasakan pengaruh dari pandemi COVID-19 adalah kawasan Asia dibanding dengan kawasan Amerika dan Australia. Pengaruh paling besar adalah pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Akan tetapi berdasarkan survei menunjukkan bahwa dampak dari COVID-19 pada negara maju lebih baik dibanding negara miskin. Sementara itu pada negara berkembang dengan negara

menengah tidak jauh berbeda (Levani 2020)

Kewaspadaan akan ancaman ekonomi akibat COVID-19 perlu ditingkatkan terutama pada negara di kawasan Asia. kawasan Asia merupakan kawasan yang paling sensitif dan rentan terjadi krisis ekonomi. Negara menengah perlu untuk bijaksana dalam mengelola situasi dalam pandemi agar tetap bisa *survive* dalam menghadapi tantangan. Negara yang bisa mempertahankan efektivitas dalam mengelola pandemi akan bisa mempertahankan statusnya, namun jika sebuah negara tidak mampu mengelola strategi dalam menangani pandemi maka akan bisa merubah statusnya.

## BAB 3

### Aplikasi Teori

#### 3.1 Politik dalam Negeri

Teori *decision making* yang digagas oleh William D. Coplin menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan pemerintah suatu negara perlu memiliki pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi tiga pertimbangan yaitu kondisi politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer dan konteks internasional, pada sub bab yang pertama peneliti akan membahas mengenai situasi politik dalam negeri yang mana hal tersebut akan berkaitan dengan pembuatan politik luar negeri suatu negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem membentuk batasan-batasan politik luar negeri faktor lainnya juga bisa mempengaruhi. Teori yang digagas oleh Coplin menggambarkan konsep dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari gagasan hingga menjadi sebuah kebijakan politik luar negeri yang selanjutnya menjadi sebuah tindakan negara (Coplin 1992).

Teori *decision making* adalah kerangka konseptual yang dapat membantu menjelaskan fenomena perdagangan internasional dengan melihat bagaimana keputusan dibuat di tingkat individu, perusahaan dan pemerintah. Cara teori *decision making* dalam pengambilan keputusan dapat menjelaskan studi kasus perdagangan internasional adalah dengan menggunakan teori utilitas yang mana menjelaskan bahwa individu atau entitas akan membuat alternatif yang memberikan manfaat yang tinggi. Kemudian dalam konteks Tiongkok, pemerintah akan memilih untuk mengimpor atau mengekspor barang dan jasa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manfaat dari perdagangan tersebut. Tiongkok mengimpor barang memberikan manfaat ekonomi kepada konsumen

karena barang yang diimpor tidak diproduksi secara efisien secara domestik. Kemudian dalam *decision making* juga terdapat komparatif keunggulan yang mana menjelaskan bahwa perdagangan internasional akan terjadi ketika negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang atau jasa tertentu (Coplin 1992).

Kemudian di dalam teori *decision making* penetapan harga menjelaskan bagaimana harga ditentukan dalam pasar internasional berdasarkan penawaran dan permintaan dari negara-negara yang terlibat dalam perdagangan. Negara akan melakukan keputusan perdagangan berdasarkan pada harga internasional yang memungkinkan untuk mendapat manfaat maksimal dari ekspor dan impor (Coplin 1992).

Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka teori *decision making*, studi kasus perdagangan internasional khususnya pada aspek ekspor-impor dapat dianalisis lebih baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti preferensi, keunggulan, komparatif harga, hingga siklus produksi sebuah barang. *Decision Making* membantu dalam memahami alasan dibalik keputusan perdagangan yang diambil oleh negara-negara dan entitas ekonomi lainnya di pasar global (Davies 2003).

Menurut Coplin ada pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Pertimbangan tersebut adalah politik dalam negeri yang merupakan sebuah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam sebuah pemerintahan serta semua yang mempengaruhinya terhadap politik dalam negeri yang ada di sebuah negara. Situasi politik yang terjadi di dalam sebuah negara akan menimbulkan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik

luar negeri. Namun, tidak hanya dari birokrasi pengaruh juga berasal dari media massa, partai politik, serta kelompok yang berkepentingan (Coplin 1992).

Dalam pengambilan keputusan, media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, preferensi, dan keputusan individu. Media massa dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik terhadap topik atau isu yang sedang dibicarakan dalam konteks penelitian ini adalah COVID-19. Media massa dapat mempengaruhi apa yang dapat dipertimbangkan oleh masyarakat hingga pembuat kebijakan. Selain itu tugas dari media massa dalam pembuatan kebijakan adalah memberikan pengaruh opini public. Melalui berita media massa dapat mempengaruhi opini public tentang bisu pandemi COVID-19. Opini masyarakat selanjutnya digunakan untuk menyampaikan pesan persuasif yang dapat mempengaruhi sikap, keyakinan serta perilaku pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (Coplin 1992).

Media massa dalam memberikan pengaruh memiliki tiga jenis sifat yang pertama adalah positif yang mana media massa sebagai pemberi opini dan berita yang positif dalam sebuah isu. Kedua adalah negatif yang mana media memberikan opini yang cenderung menyudutkan suatu isu, dan yang terakhir adalah netral yaitu media massa tidak melakukan pemberitaan yang positif maupun negatif. Dalam isu yang diangkat dari pemberitaan media Asia Pasifik menyatakan bahwa media Tiongkok pada saat terjadinya COVID-19 pada awalnya cenderung meremehkan virus tersebut sehingga banyak masyarakat yang masih mengabaikan bahayanya virus tersebut (Voa 2023).

Kemudian komponen berikutnya adalah partai politik yang mana menurut Coplin partai politik merupakan *partisan influencer*. Partai politik bisa dipahami

bahwa melakukan keberpihakan terhadap aktor politik yang ada di dalam eksekutif. Partai politik juga berfungsi penting dalam menyalurkan tuntutan masyarakat kepada pembuat kebijakan pada saat pandemi berlangsung. Dengan adanya partai politik pembuat kebijakan dapat ditekan untuk membuat kebijakan yang memprioritaskan masyarakatnya (Coplin 1992).

Partai Komunis Tiongkok memiliki peran yang cukup krusial dalam pembuatan kebijakan terkait realisasi perdagangan internasional Tiongkok semasa pandemi COVID-19. Partai Komunis Tiongkok merupakan pihak tertinggi dalam pembuatan keputusan politik di Tiongkok, sebagai pemerintah yang berkuasa, Partai politik memiliki kontrol penuh atas lembaga pemerintahan dan memiliki kuasa untuk mengarahkan arah tujuan negara dalam menghadapi pandemi (Khalil 2020)

Sistem politik Tiongkok terpusat di partai komunisnya sehingga cukup memungkinkan partai untuk bergerak cepat dalam mengambil keputusan dan menerapkannya di seluruh wilayah. Hal tersebut pastinya dapat mempermudah koordinasi serta implementasi kebijakan yang konsisten dalam merespon pandemi di Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok juga memiliki kendali kuat terhadap media massa dan sumber informasi di Tiongkok. Hal tersebut memungkinkan untuk mengontrol narasi seputar pandemi dan memastikan penyebaran informasi yang merata dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat (Khalil 2020)

Partai Komunis Tiongkok memiliki akses terhadap sumber daya intelektual dan ilmiah yang cukup luas melalui lembaga riset dan universitas-universitas yang ada di Tiongkok. Hal tersebut memungkinkan mendukung pembuatan keputusan terkait COVID-19. Oleh karena itu, pentingnya peran dari Partai Komunis Tiongkok dalam pembuatan COVID-19 tidak dapat dipisahkan. Partai Komunis memainkan peran penting dalam merancang, mengkoordinasikan

serta melaksanakan respon terhadap pandemi COVID-19 kepada masyarakat Tiongkok.

Selanjutnya adalah kelompok yang berkepentingan atau *interest influencer* yang terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah wadah dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Upaya yang dapat diberikan oleh kelompok berkepentingan adalah memberikan suara agar dapat menjadi pertimbangan bagi para aktor pengambil keputusan politik luar negeri. Dalam konteks pandemi COVID-19, berbagai kelompok berkepentingan di Tiongkok terdiri dari pemerintah, tenaga medis dan peneliti, industri kesehatan dan farmasi, warga negara (Coplin 1992).

Pemerintah Tiongkok memiliki peran utama dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk dalam pengambilan keputusan kebijakan, koordinasi respon kesehatan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan protocol pencegahan COVID-19, Pemerintah Tiongkok bertanggung jawab atas penanganan pandemi secara keseluruhan dan upaya-upaya untuk membatasi penyebaran virus serta menjamin ketersediaan barang di negaranya. Dalam hal ini pemerintah Tiongkok melakukan *lockdown* dan melakukan impor barang dari negara lain (Gill 2020).

Pemerintah Tiongkok tidak bekerja sendiri yang mana dalam menjalankan tugasnya ada peran dari tenaga medis dan peneliti yang ikut serta dalam kelompok berkepentingan. Para tenaga medis dan peneliti bekerja keras untuk menemukan vaksin dan merawat pasien yang terpapar virus COVID-19. Setelah berhasil menciptakan vaksin selanjutnya vaksin tersebut didistribusikan secara massal baik secara nasional maupun di ekspor pada negara lain

Perusahaan farmasi juga termasuk dalam kelompok yang berkepentingan yang mana memiliki kepentingan dalam produksi dan ekspor alat medis, obat-

obatan, dan vaksin untuk menangani COVID-19. Di samping hal tersebut warga negara Tiongkok juga menjadi kelompok berkepentingan yang mana mereka terlibat dalam kepatuhan dalam penerapan kebijakan yang dibuat dan diterapkan pemerintah pusat serta mengikuti vaksinasi yang diberikan oleh lembaga medis Tiongkok. Tokoh diplomatik yang terdiri dari diplomat dan pejabat ikut serta terlibat dalam upaya diplomatik untuk membentuk persepsi internasional mengenai cara Tiongkok menangani pandemi. Para diplomat ikut serta dalam forum internasional dan mempromosikan narasi Tiongkok tentang solidaritas dan kerja sama global dalam menangani virus. (Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy 2021).

Menurut pernyataan Coplin yang menyebutkan sebuah kebijakan dibuat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di sebuah negara maka jika dilihat dari kerja sama antara pemerintah dengan warga negara Tiongkok yang solid tersebut dapat menciptakan cita-cita Pemerintah Tiongkok yang mana menciptakan pemerintahan yang baik, setelah pandemi mereda masalah Tiongkok belum selesai karena ancaman di sektor ekonomi menghantui Tiongkok sehingga mau tidak mau harus mencari cara untuk recovery di sektor ekonomi dan mengembalikan citra Tiongkok di mata dunia yang sebelumnya dianggap sebagai negara penyebar virus. Tiongkok yang memberikan sumbangan vaksin ke negara lain memiliki tujuan untuk mengembalikan nama baiknya dan mempertahankan hubungan kerjasamanya dengan negara lain (Coplin 1992).

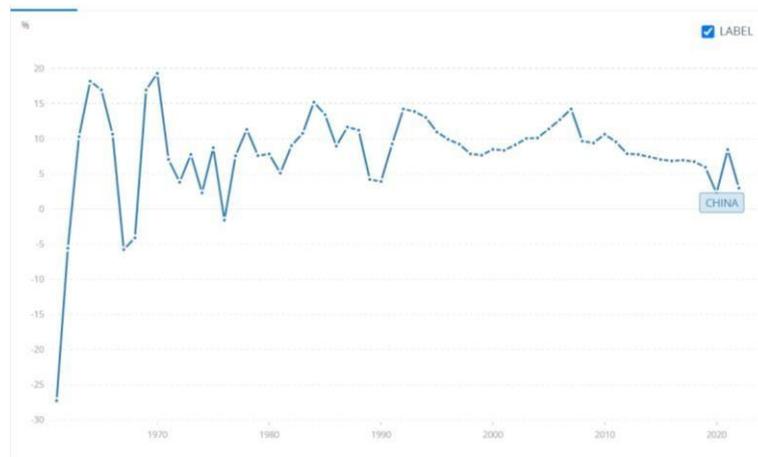
Selama pandemi COVID-19 berlangsung, birokrasi yang berpengaruh di Tiongkok memainkan peranan penting dalam menerapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan virus tersebut dan mengelola dampak dari virus tersebut. Di tingkat pusat, Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang memberikan panduan dan arahan untuk respon negara dalam

menangani pandemi. Kemudian di tingkat provinsi para pejabat juga melakukan hal penting yaitu menerapkan *lockdown*, pengujian massal, dan melakukan karantina bagi masyarakat yang terjangkit virus. selain itu, para ahli di bidang epidemiologi dan kesehatan masyarakat Tiongkok memberikan saran untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat. Keahlian dan kerja sama dari berbagai elemen berkontribusi untuk membantu membuat strategi respon pemerintah dalam pengelolaan krisis secara keseluruhan. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dengan birokrasi di Tiongkok mencerminkan keseriusan dalam mengatasi tantangan global yang ditimbulkan oleh COVID-19 dan memitigasi dampak krisis terhadap perekonomian di Tiongkok (Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy 2021).

### **3.2 Ekonomi**

Aspek kemampuan ekonomi merupakan hal yang cukup penting dalam pembuatan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. William D. Coplin dalam menilai kemampuan ekonomi membagi menjadi dua variabel yaitu kapasitas produksi ekonomi dan ketergantungan ekonomi pada perdagangan dan finansial internasional. Coplin menyatakan bahwa semakin kuat perekonomian di sebuah negara maka akan kuat pula militer negara tersebut (Coplin 2003). Akan tetapi, aspek militer di dalam penelitian ini tidak relevan sehingga lebih berfokus pada aspek ekonomi. Kemajuan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat membuatnya sebagai negara terdepan dalam perekonomian dunia.

Gambar 3. PDB Tiongkok



Sumber: Bank Dunia (2023)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa PDB Tiongkok bisa dikatakan cukup stabil dari tahun ke tahun. Menurut IMF Tiongkok memiliki PDB terbesar kedua di bawah Amerika Serikat. Pada tahun 2020 PDB Tiongkok sedikit mengalami penurunan mengingat pada saat itu pandemi sedang melanda seluruh dunia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan PDB Tiongkok akan pulih secara cepat. Data terbaru yang diperoleh dari *National Bureau Statistics* atau Biro Statistik Tiongkok pada Tahun 2022 PDB Tiongkok mencapai 120.4724 Triliun Yuan kemudian pada 2023 mengalami kenaikan kembali dan tumbuh di angka 5,2% yang mencapai 126,06 triliun yuan (World Bank 2023).

Pertumbuhan PDB yang cukup tinggi telah berkontribusi besar untuk mengantarkan Tiongkok menjadi negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut pastinya didorong juga oleh kegiatan ekspor dan impor, pembangunan infrastruktur, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Produk Domestik Bruto dapat menjadi indikator kuat mengenai kekuatan ekonomi dan seberapa besar pengaruh Tiongkok pada dunia.

PDB Tiongkok dapat dikatakan sebagai penggerak utama roda perekonomian dunia yang mempengaruhi perdagangan global, penanaman investasi dan harga komoditas dunia. Keunggulan Tiongkok dalam perekonomian dunia menjadikannya sebagai mitra penting bagi banyak negara. Hingga saat ini sudah banyak negara yang menjalin kerja sama dengan Tiongkok untuk membentuk dinamika perdagangan global. Kebanyakan negara yang berhubungan dengan Tiongkok sedang membutuhkan tenaga kerja dari Tiongkok yang dapat dinilai lebih murah untuk memproduksi berbagai macam produk untuk pasar internasional. Hal tersebut membuat Tiongkok dijuluki sebagai “pabrik dunia” dan pastinya strategi Tiongkok sangat berkontribusi besar dalam perkembangan PDB. Sedangkan kemampuan Tiongkok dalam mempengaruhi harga komoditas dunia dapat dilihat dari tingginya keinginan Tiongkok terhadap komoditas minyak, bijih besi, baja dan beberapa produk pertanian. Fluktuasi permintaan barang oleh Tiongkok tersebutlah yang dapat mengatur stabilitas harga komoditas dunia secara keseluruhan (Rauch 2010).

Minat Tiongkok yang lebih condong ke barang hasil alam seperti baja, besi, dan komoditas lainnya menyebabkan pesatnya pertumbuhan di bidang industri dan teknologi yang telah dihasilkan saat ini. Tiongkok berhasil menunjukkan pada dunia sebagai salah satu negara yang patut diperhitungkan dalam perekonomian dunia. Semasa pandemi berlangsung dibuatnya kebijakan yang telah diterapkan pemerintah membuat Tiongkok semakin terbuka dalam melakukan perdagangan internasional dan sebagai pegangan Tiongkok untuk menjalin kerja sama dalam sektor ekonomi dengan negara-negara lain. Tiongkok berpotensi untuk lebih bebas dalam melihat pasar yang lebih jauh lagi dan hal tersebut akan berpotensi untuk menarik investasi-investasi asing ke Tiongkok.

Sistem ekonomi Tiongkok merupakan sistem ekonomi sosialisme pasar. Perekonomian Tiongkok merupakan yang terbesar kedua di dunia dan Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang terbesar kedua untuk negara ekonomi maju. Tiongkok menjadi negara penerima investasi asing langsung terbesar di antara negara-negara berkembang dan perusahaan investasi luar negeri Tiongkok telah aktif dan mulai menunjukkan di skala global. Tiongkok mendapatkan predikat negara terbaik di kancah internasional sebagai target utama dalam investasi asing langsung selama bertahun-tahun walaupun reformasi ekonomi di Tiongkok telah memainkan peran sentral dan fundamental. Penerapan sosialisme pasar di Tiongkok berdampak besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat Tiongkok.

Investasi besar-besaran yang dilakukan Tiongkok dalam kemajuan teknologi dengan tujuan untuk mempertahankan PDB dan menjadi pemimpin global di berbagai sektor merupakan sebuah bukti betapa kuatnya perekonomian Tiongkok dalam menghadapi krisis yang sedang menyerang. Sistem perekonomian Tiongkok yang terbuka membuat negara Tiongkok disegani dalam perekonomian dunia lewat investasi besar yang dilakukannya. Perkembangan ekonomi Tiongkok tidak hanya mensejahterakan rakyat Tiongkok tetapi juga meningkatkan pengaruh Tiongkok di dunia internasional. Kemampuan inilah yang tidak hanya akan menentukan masa depan Tiongkok namun juga akan menentukan arah perekonomian dunia. Jika dilihat dengan perkembangan PDB Tiongkok, perannya akan semakin besar dalam perekonomian dunia (Jain 2017).

Dengan melihat paparan diatas, sangat jelas terlihat peran Tiongkok sebagai roda penggerak perkonomian dunia, yang tiba-tiba mengalami kemunduran yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar hampir 5% sangat jauh dibanding pertumbuhan

ekonomi Tiongkok yang anjlok pada waktu pandemi muncul pertama kali. Dan dengan adanya kebijakan karantina wilayah, pembatasan produksi di pabrik-pabrik menyebabkan perekonomian Tiongkok menurun hingga 6.8%. dan strategi Tiongkok dengan menerapkan pembatasan atau karantina di wilayah-wilayahnya dan mendorong impor ternyata berhasil dan Tiongkok dengan cepat bisa mengendalikan wabah COVID-19, bahkan membantu negara-negara terdampak dengan supply peralatan medis maupun obat-obatan, dan hal ini akhirnya yang mengubah paradigma Tiongkok sebagai negara penyebar Virus menjadi negara yang bisa pulih dengan cepat karena wabah COVID-19, pulih dalam segala hal mulai kesehatan, perekonomian, sosial, budaya dan militer. Dan setelah pandemi berlalu saat ini Tiongkok menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang paling stabil di dunia, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya nilai ekspor maupun impor (BBC 2020).

### **3.3 Konteks Internasional**

Faktor Ketiga yang mempengaruhi pembuatan sebuah kebijakan adalah konteks internasional. Konteks internasional berkaitan dengan hubungan-hubungan suatu negara dengan negara lain. William D. Coplin menyatakan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan internasional antar negara dengan kondisi yang ada di dalam sistemnya, menentukan bagaimana negara tersebut akan berperilaku (Coplin 1992).

Pasar global memiliki peranan yang sangat penting untuk perdagangan Tiongkok. Pasar global merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dengan berpartisipasi dalam perdagangan internasional Tiongkok dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar internasional dan meningkatkan

investasi asing ke dalam negaranya. Melalui ekspor ke pasar global, Tiongkok dapat mempromosikan produknya di pasar global sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonominya. Di samping itu, Tiongkok juga dapat memperoleh akses teknologi dan sumber daya yang tidak dimilikinya secara lokal, sehingga pasar global mampu mendukung pertumbuhan industrinya (Soehandoko 2023).

Oleh karena itu, pasar dunia global memiliki peranan penting dalam strategi ekonomi Tiongkok karena dapat memberikan akses ke peluang perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan Tiongkok pada pasar global dapat mengurangi ketergantungannya pada pasar domestik, hal tersebut memberikan keamanan yang lebih besar dan membantu meringankan risiko terkait fluktuasi permintaan dalam negeri. Walaupun Tiongkok telah melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar global dengan cara meningkatkan konsumsi dalam negeri dan perdagangan dalam negeri, namun pasar global tetap menjadi pilar utama dalam perekonomian Tiongkok (Platt 2023).

Tiongkok memiliki ketergantungan yang sangat kuat pada pasar global dalam hal perdagangan, investasi, dan rantai pasokan. Namun, ketika ditemukannya pandemi Tiongkok mengalami kekacauan di perekonomian domestiknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok masih memiliki ketergantungan pada pasar global. Pandemi menyebabkan penurunan permintaan global, gangguan rantai pasokan dan pembatasan perdagangan internasional sehingga menyebabkan penurunan ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Aulia 2023).

Perbedaan infrastruktur antar wilayah di Tiongkok juga menjadi tantangan dalam kerja sama geografis selama pandemi. Beberapa wilayah dapat terhubung

dengan baik dengan alat transportasi dan layanan kesehatan yang memadai. Namun, di sisi lain ada wilayah yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi respon terhadap kondisi pandemi yang sedang terjadi. Kepadatan populasi Tiongkok juga menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk Pemerintah Tiongkok yang mana semakin padat penduduk maka risiko penularan COVID-19 juga akan semakin tinggi dan akan lebih sulit untuk ditangani.

Mobilitas penduduk selama terjadinya pandemi yang terbatas juga dapat menimbulkan tantangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung akan lebih sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan dan informasi update mengenai pandemi. Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Tiongkok sangat berhati-hati melihat tantangan-tantangan yang dihadapinya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam pembuatan kebijakan. Tiongkok juga berupaya memperkuat infrastrukturnya dan kapasitas system kesehatan di seluruh wilayahnya. Dengan upaya yang dilakukan Bersama maka Tiongkok bisa mengatasi tantangan geografisnya dan merespon COVID-19 dengan efektif di seluruh wilayahnya (Xiang 2020).

Seperti yang kita ketahui bahwa Tiongkok merupakan negara yang tidak pernah kehabisan strategi sehingga Tiongkok bisa menjadi salah satu negara terkuat yang hingga saat ini bersaing dengan Amerika Serikat. Meskipun pandemi sedang melanda Tiongkok tetap memperluas relasi pasar dengan menjalin hubungan baik dengan negara tetangga. Pembatasan aktivitas selama pandemi berdampak besar pada perlambatan ekonomi internasional, artinya adalah ekspor dan impor yang dilakukan Tiongkok terganggu. Sehingga aktor pembuat kebijakan perlu memperhatikan hubungan antara ekonomi dengan politik di konteks internasional

dalam pembuatan kebijakan.

Bisnis Tiongkok telah masuk ke dalam pasar internasional melalui berbagai strategi. Sebelum pandemi muncul Tiongkok memanfaatkan ekspor sebagai senjata utama untuk masuk ke pasar global. Tiongkok menjual berbagai produk manufaktur, barang konsumsi, dan teknologi ke luar negeri. Beberapa perusahaan di Tiongkok juga memilih untuk melakukan investasi langsung dan membuka pabrik ke luar negeri. Hal tersebut membantu mereka untuk mendekati pelanggan dan memperluas jangkauan secara global. Platform e-commerce di Tiongkok menjadi sarana paling penting untuk memasuki pasar global. Platform tersebut menyediakan akses ke pasar global untuk produsen Tiongkok. Akan tetapi setelah pandemi ditemukan semua strategi Tiongkok tersebut terhenti dan memperlambat ekspansi internasional.

Alasan pandemi menghentikan langkah Tiongkok adalah pembatasan perjalanan dan logistik yang mana pada saat pandemi melanda dunia bisnis global mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian, penurunan permintaan global untuk barang-barang tertentu juga mengalami penurunan selama pandemi yang mengakibatkan berkurangnya peluang bisnis untuk ekspor dan menjual produk di pasar internasional. Ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 membuat bisnis Tiongkok tidak mau mengambil risiko dan menghentikan sementara ekspansinya di pasar global. Walaupun demikian, banyak bisnis Tiongkok tetap berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru yang diakibatkan oleh pandemi dan mencari celah baru untuk tetap terlibat dalam perdagangan internasional meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan (BBC 2020).

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional Tiongkok pada aspek ekspor dan impor semasa pandemi COVID-19 pada tahun 2020- 2022 mendorong terjadinya impor yang lebih besar dibanding ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut di dalam penelitian ini teori yang cocok untuk digunakan adalah teori *decision making* yang digagas oleh William D Coplin yang mana berisi tentang proses-proses pembuatan kebijakan di sebuah negara, aktor yang terlibat, dan faktor yang mempengaruhi dibuatnya sebuah kebijakan.

Tabel 1. Tabel Aplikasi

<b>No</b>	<b>Pertimbangan dalam <i>Decision Making</i></b>	<b>Aplikasi</b>
1	Politik dalam negeri	Kerjasama yang solid antara warga negara dengan pemerintah Tiongkok sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dalam menghadapi krisis. Warga negara Tiongkok melalui media massa, partai politik, dan kelompok berkepentingan memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

No	Pertimbangan dalam <i>Decision Making</i>	Aplikasi
2	Ekonomi	Perekonomian Tiongkok masih sangat bergantung pada perdagangan global. Meskipun terjadi penurunan pada saat pandemi, Tiongkok berhasil mengatasi dampak dengan kebijakan yang efektif.
3	Konteks Internasional	Tiongkok telah berupaya menyesuaikan diri dengan situasi baru. Namun, tantangan ekonomi dan sosial yang muncul akibat pandemi COVID-19, yang menuntut koordinasi antara pelaku bisnis dengan pembuat kebijakan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan yang efektif. Sehingga dengan kebijakan yang tepat, Tiongkok bisa menjadi aktor penggerak perekonomian dunia.

Teori yang digagas oleh Coplin menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang diambil sebuah negara. Faktor yang pertama adalah politik dalam negeri yang mana di dalamnya terdapat beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut akan membantu dalam memahami alasan dalam pembuatan kebijakan. Dalam politik dalam negeri seorang pemimpin dan aktor pembuat kebijakan akan memperhatikan kondisi dalam negerinya (Coplin

1992). Tahapan yang dilakukan oleh aktor pembuat kebijakan adalah merencanakan konsep kepentingan nasional, membuat keputusan, kemudian keputusan tersebut akan diterapkan dan dievaluasi.

Pemerintah Tiongkok dalam mengambil keputusan yang akan diterapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu media massa, birokrasi, partai politik, dan kelompok yang berkepentingan. Peran birokrasi Tiongkok adalah mendorong Pemerintah Tiongkok untuk membuat sebuah kebijakan yang digunakan untuk menjamin keamanan masyarakat. Kemudian media massa memberikan informasi dan mempengaruhi opini publik, sementara partai politik serta kelompok berkepentingan menyalurkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Tiongkok menunjukkan solidaritas yang kuat untuk mempertahankan kesejahteraan negaranya. Opini masyarakat yang didukung oleh faktor di atas mendesak Pemerintah Tiongkok untuk memenuhi semua kebutuhannya dan membuat sebuah kebijakan akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan yang diterapkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan mendorong impor lebih tinggi dibanding ekspor yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tiongkok yang semakin melonjak. Partai Komunis Tiongkok memiliki peran paling dominan dalam pembuatan keputusan politik dan penanganan COVID-19 dengan kontrol yang kuat atas sumber daya, informasi, dan Lembaga pemerintahan, Partai Komunis Tiongkok memiliki peran yang krusial dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi respon terhadap krisis yang sedang melanda.

Faktor kedua yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan adalah hubungan ekonomi dan militer di suatu negara. Kuat atau lemahnya perekonomian sebuah negara dapat diperhatikan melalui pertumbuhan PDB. Kekuatan ekonomi

terbesar Tiongkok didorong oleh ekspor, impor, pembangunan infrastruktur dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Walaupun aspek militer di dalam penelitian ini tidak relevan, perlu diingat bahwa Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara dengan PDB yang cukup kuat sehingga semua aktivitas perekonomian dunia sangat bergantung pada Tiongkok. Pertumbuhan PDB yang tinggi menjadi penggerak utama bagi perekonomian global yang akan mempengaruhi perdagangan internasional, investasi, dan harga komoditas dunia. Tiongkok menggunakan strategi perdagangan internasional yang terbuka sehingga meningkatkan minat negara lain untuk berinvestasi dengan Tiongkok. Oleh karena itu, hubungan antara ekonomi dengan militer Tiongkok akan menjadi faktor penting di masa mendatang untuk menentukan tujuan dan peran Tiongkok di kancah internasional.

Faktor terakhir adalah konteks internasional yang mana ada beberapa variabel juga yaitu geografis, ekonomi dan politik. Letak suatu negara atau letak geografis sangat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan sebuah negara. Keadaan politik negara satu kawasan juga turut menjadi pertimbangan. Dalam penelitian ini Tiongkok berusaha menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di negaranya. Namun, dalam praktiknya Tiongkok menemukan beberapa tantangan yang muncul akibat dari keberagaman masyarakat, perbedaan infrastruktur, hingga perbedaan kepadatan penduduk antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan oleh Pemerintah Tiongkok.

Pasar global memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mana memberikan akses ke peluang perdagangan, investasi, teknologi dan inovasi. Walaupun demikian, COVID-19 telah menunjukkan

ketergantungan yang cukup kuat Tiongkok terhadap pasar global. Dengan gangguan rantai pasokan dan permintaan global yang menurun membuat ekspansi internasional Tiongkok menurun.

Perdagangan Tiongkok yang mendorong impor lebih banyak daripada ekspor selama pandemi merupakan wujud dari Pemerintah Tiongkok yang ingin menjamin keamanan seluruh warga negaranya. Impor yang dilakukan oleh Tiongkok adalah bukti bahwa pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang melonjak pada saat pandemi. Walaupun kondisi seluruh negara pada tahun 2020 hingga 2022 sedang mengalami krisis Tiongkok tetap melakukan ekspor yang kebanyakan komoditasnya adalah alat kesehatan dan vaksin yang mana pada saat itu banyak negara yang membutuhkannya. Pemerintah Tiongkok berusaha untuk menghindari konflik dengan negara lain selama pandemi berlangsung. Perekonomian Tiongkok yang stabil tersebut dapat dilihat dari PDB Tiongkok yang tetap terjaga selama pandemi. Di samping untuk menjaga stabilitas ekonomi, diplomasi-diplomasi yang dilakukan Tiongkok bertujuan untuk mengembalikan citra Tiongkok di mata dunia yang pada saat itu dianggap sebagai negara penyebar virus dan gagal untuk menangani wabah yang sedang terjadi. Menurut peneliti faktor-faktor yang diperhatikan serta strategi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok cukup efektif yang mana bisa dilihat dari pemulihan Tiongkok yang sangat pesat pasca pandemi.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian yang dilakukan berfokus pada faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional Tiongkok pada aspek ekspor dan impor yang mendorong terjadinya impor yang lebih besar dibanding ekspor pada tahun 2020-2022. mengingat kasus yang dibahas bisa dikatakan merupakan kasus yang baru,

maka kurangnya literatur membuat peneliti sadar bahwa di dalam penelitian ini masih belum maksimal dan masih adanya celah yang belum peneliti bahas. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini akan mengalami perkembangan seiring berjalannya. hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktivitas baru yang muncul setelah pandemi mulai menghilang. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan akan ada hal baru yang dapat diteliti. Untuk itu, peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi dengan menggunakan keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam terhadap teori yang telah digunakan melengkapi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara. (2010). *Prosedur Pengangkutan Barang Ekspor Pola Full Container Load Melalui Jasa Ekspedisi Muatan Kapal*. Surakarta.
- Agusalim, Lestari. 2017. "Dampak Pajak Ekspor terhadap Peningkatan Nilai Tambah: Studi Empiris Agroinfustru di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*.
- Al Takarli, Nourah S. 2020. "China's Response to the COVID-19 Outbreak: A Model for Epidemic Preparedness and Management." *Dubai Medical Journal* 45-50.
- Andriole, Stephen J. 1979. "Decision Process Models and the Needs of Policy Makers: Thoughts on the Foreign Policy Interface." *Journal Policy Science* 19-37.
- Andrianto. 2018. "Pandangan Neorealisme Terhadap Mercosur Sebagai Institusi Perdagangan di Kawasan Amerika Serikat." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Andriole, Stephen J. 1979. "Decision Process Models and the Needs of Policy-Makers: Thoughts on the Foreign Policy Interface." *Policy Sciences*.
- Anholt, Simon. 2013. "Beyond National Brand." *Journal of Public Diplomacy* 58-60.
- Arase, David. 2015. "China's Two Silk Roads: Implications for Southeast Asia."
- Armstrong, Paul. 2019. "China Fragile Economy." *Journal of International Affairs*.
- Asrudin, Azwar. 2014. "Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme Sebagai Paradigma." *Indonesian Journal of International Studies*.

- Astuti, Yudono & Nathanael. 2021. "China,s Wolf Warrior Diplomacy On Social Media in the Era of COVID-19." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Aulia, Luki. 2023. *Dampak Ganda Pembukaan Ekonomi China bagi Pasar Global*. January 14. Accessed March 02, 2024. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/01/13/dampak-ganda-pembukaan-ekonomi-china-bagi-pasar-global>.
- Burhan, Sri Yusnita. 2021. "Potret Sub Sektor Unggul Pada Perdagangan Indonesia-Cina Periode 2014-2020."
- Chan, Lee. 2020. "Can China Remake Regional Order? Contestation with India over the Belt and Road Initiative."
- Changhoon. 2017. "China's Westward March: Strategic Views of One Belt One Road." *The Korean Journal of International Studies*
- Chao-Chen, L. 2013. "Convergence of new and Old Media: New Media Representation in Traditional News." *Chinese Journal of Communication* 183-202.
- Coplin, D. W. 1992. *Introduction to International Politics. edisi Bahasa Indonesia Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, edisi ke-2*. Bandung: Sinar Baru.
- Coplin, W. D. 2013. *Pengantar Politik Internasional (2nd ed.)*. Sinar Baru Algensindo. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Coplin, William D. 1965. "International Law and Assumptions about the State System." *World Politic*.
- Coplin, William D. 1971'. "International Organizations in the Fuuture International Bargaining Process: A Theoretical Projection." *Journal of International Affairs*.

- Duckett, Jane. 2021. "China's Post COVID Challenges." *Journal Indexing and Metrics*.
- Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M.Si. 2021. *Problematika Pandemi COVID-19*. Depok: Semesta Irfani Mandiri.
- Fakhriansyah, M. 2023. *HP China Dulu Dihina Kini Raja Dunia, Ini Resep Rahasiannya*. CNBC Indonesia.
- Fedson, David S. 2005. "Preparing for Pandemic Vaccination: An International Policy Agenda for Vaccine Development." *Journal of Public Health Policy*.
- Feng, Lei, Xuehui Zhang, and Kaige Zhou. 2018. "Current Problems in China's Manufacturing and Countermeasures for Industry 4.0." *Journal on Wireless Communications and Networking*.
- Guttam Priya, Japal Kaur & Singh. 2020. "COVID-19 and Chinese Global Health Diplomacy ." *Journal Millenial Asia*.
- Hang, Nguyen Thi Thuy. 2017. "The Rise of China." *Indian Journal of Asian Affairs*.
- Hansen, Jaqueline, Antonia Kamaliev, and Hans-Jorg Schmerer. 2023. *The COVID-19 Pandemic and Chinese Trade Relations*. National Library of Medicine.
- Hotez, P. J. 2014. "'vaccine diplomacy': Historical Perspective and Future Direction. PLoS Neglected Tropical Disease."
- Hutabarat, R. 1991. *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Erlangga.
- Hutabarat, R. 1990. *Transaksi Ekspor Impor Edisi Ke-2*. Surabaya: Erlangga.
- Leibold, James. 2010. "The Beijing Olympics and China's Conflicted National Form." *The China Journal*.
- Levani, Yelvi, Aldo Dwi Prasty, and Siska Mawaddatunnadila. 2021. "Coronavirus

- Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi, Klinis, dan Pilihan Terapi." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*
- Li, Yaling. 2020. "The Influence of Manufacturing Export Trade on Marine Ecological Environment in China." *Journal of Coastal Research*.
- Lim, T.W., H.H. Chan, and K.H. Tseng. 2016. *China's One Belt One Road Initiative*. London, UK.: Imperial College Press.
- Li, Linda Chelan. 2009. "Decision Making in Chinese Local Administrative reform: Path Dependence, agency and implementation." *Journal of Administration and Development*.
- Liu, Kelly, and Kevin James. 2011. "Foreign Direct Investment in China Manufacturing Industry-Transformation From a Low Tech to High Tech Manufacturing." *International Journal of Business and Management* .
- Liu, Yu & Richard B. Saltman. 2020. "Policy Lesson from Early Reaction to COVID-19 Virus in China." *American Journal of Public Health*.
- Maacias, Gustavo A. Flores, and Sarah E. Kreps. 2013. "The Foreign Consequences of Trade: China's Commercial Relations with Africa and Latin Amerika." *The Journal of Politics*.
- Napoli, Christopher. 2014. "China's Economy Rise: Implications for ASEAN Trade Flows." *Journal of Southeast Asian Economies*.
- Nie, Wenjuan. 2016. "Xi Jinping's Foreign Policy Dilemma: One Belt, One Road or the South China Sea." *Contemporary Shouteast Asia*.
- Nolt, James H. 2002. "China's Declining Military Power." *The Brown Journal of World Affairs*.
- Oatley, T. 2016. *International Political Economy*. New York: Routledge.
- Peng, Z. 2004. "Representation of China: An Across Time Analysis of Coverage in

the New York Times and Los Angeles Times." *Asian Journal of Communication*.

Platt, Brian. 2023. *China Menimbang Cara Kurangi Ketergantungan Batubara*.  
September 02. Accessed March 02, 2024.  
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/14217/china-menimbang-cara-kurangi-ketergantungan-batubara>.

Potter, William C. 1980. "Issue Area and Foreign Policy Analysis." *Journal of International Organization*, Vol. 34, No. 3.

Putri, Acinta Bunga & Suhadak. 2019. "Uji Beda Ekspor dan Impor Indonesia Sebelum dan Sesudah Terjadi Perang Dagang Amerika Serikat dan China." *Jurnal Administrasi Bisnis* 81-90.

Radityo, Fransiskus, and Gabriella Rara. 2019. "Geopolitik Tiongkok di Kawasan Asia Tenggara: Jalur Perdagangan (OBOR)." *Journal Asia Pacific Studies*.

Rahmah Syahidah, Annisa. 2016. "Pengaruh ASEAN-CHINA Free Trade Area terhadap Ekspor dan Impor Indonesia-China." *Jurnal Administrasi Bisnis* 73-80.

Ravenhill, J. 2008. *Regionalism dalam Global Political Economy*. Oxford: Oxford University Press.

Rawski, Thomas G. 1999. "Reforming China's Economy: What Have We Learned?" *The China Journal*.

Ross Levine, D. R. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross Country Growth Regression. *The American Economic Review*.

Saltybayev, Yerzhan. 2018. "BRI and Kazakhstan: Challenges and Outlooks of China's Grand Strategy in Central Asia." *Journal of International Relations and Sustainable Development* 76-85.

- Saputra, Dany. 2021. *Ekspor China Melesat, Impor Tertinggi dalam Empat Tahun*.  
Ekonomi Global, Ekonomi.Bisnis.Com.
- Setiawan. 2020. "Politik Luar Negeri Indonesia Era COVID-19: Penyelamatan dan  
Kerja Sama." *Jurnal Politik Indonesia dan Global*.
- Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Thesis*.  
Yogyakarta: Suaka Media.
- Soehandoko, Jessica Gabriela. 2023. *Ini Alasan Mengapa Ketegangan AS-China  
Pengaruhinya Pasar Global*. October 2. Accessed March 02, 2024.  
[https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20231002/620/170012  
0/ini-alasan-mengapa-ketegangan-as-china-pengaruhinya-pasar-global](https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20231002/620/1700120/ini-alasan-mengapa-ketegangan-as-china-pengaruhinya-pasar-global).
- Taylor, Charles. 1966. "China's Foreign Policy." *International Journal*.
- Terrill, Ross. 1980. "US-China Relations." *The Australian Journal of Chinese  
Affairs*.
- Verma, R. 2020. "China's Diplomacy and Changing the COVID-19 Narrative."  
*International Journal* 240-258.
- Wang, H. 2003. "National Image Building and Chinese Foreign Policy." *China  
International Journal* 46-72.
- Woodward, Dennis. 1985. "China's Industrial Reform Policy." *The Australian  
Journal of Chinese Affairs*.
- Wu, Xinxiong. 2022. *Addressing the COVID-19 Shock: The Potential Job Creation  
in China by the RCEP*. Public Health, National Library of Medicine.
- Wu, Xjiangning, and You Ji. 2020. "The Military Drivers of China's Belt and Road  
Endeavor: Expanding the Global Reach from Land Mass to the Maritime  
Domains." *China Review* 223-244.

- Zhou, Na, Jinkai Zhao, and Dong Li. 2021. "Analysis on the sources of China's Economic Growth From the Perspective of Cleaner Production." *Journal of China*.
- Zhu, Xiaodong. 2012. "Understanding China's Growth: Past, Present, and Future." *The Journal of Economic Perspective*.
- Swaine, Michael D. 2020. *Chinese Crisis Decision Making Managing the COVID-19 Pandemic Part One: The Domestic Component*. 01 June. Accessed Februari 29, 2024. <https://carnegieendowment.org/2020/06/01/chinese-crisis-decision-making-managing-covid-19-pandemic-part-one-domestic-component-pub-81952>.
- WITS. 2021. *China Trade Summary 2021 Data*. Accessed March 2, 2024. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/LTST/Summary>.
- OECD. 2020. *China Yearly Trade Flow 2020*. Accessed March 2, 2024. <https://oec.world/en/profile/country/chn?yearSelector1=2020&yearlyTradeFlowSelector=flow1&tradeScaleSelector1=tradeScale0>.
- BBC. 2020. *Covid-19: Ekonomi China bangkit setelah merosot karena pandemi virus corona, tumbuh hampir 5% - apa faktor penting di balik pemulihan?* October 19. Accessed March 2, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54595637>.